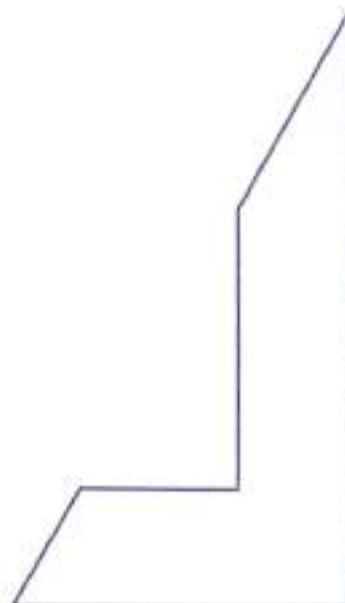
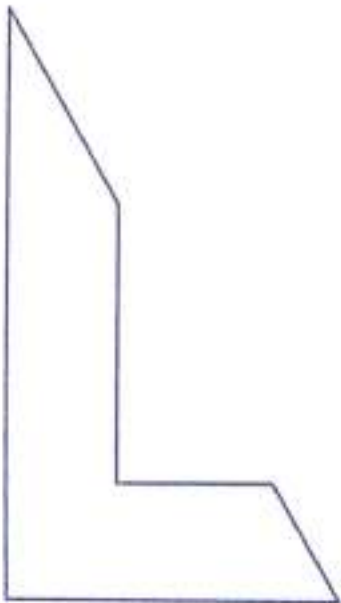


**SK IKU DAN PERUBAHAN IKU  
22 JULI 2022  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN SIKKA**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**KABUPATEN SIKKA**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jln. Eltari, Wairklau - Telp.

**MAUMERE**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 31.a TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN UKM KABUPATEN SIKKA

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SIKKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor ..... Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama 31.a Tahun 2019-2023;

- 25 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

- 26 -

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja ..... (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor .....);
  10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 14);
  11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 44); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 47);

- 27 -

12. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Nomor 13.a

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN UKM KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 31.a TAHUN 2022  
TANGGAL 22 Juli 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN SIKKA NOMOR  
44 TAHUN 2019 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN UKM KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2019-2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab.Sikka

Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, Bidang  
Koperasi dan UKM serta Bidang Perindustrian

Fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis dibidang  
Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah serta Perindustrian, Pelaksanaan Norma,  
Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang  
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
serta Perindustrian, Penyelenggaraan Urusan  
Keseekretariatan, Pembinaan Kelompok Jabatan  
Fungsional dan Pelaksanaan Fungsi Lain yang  
diberikan Bupati

Visi : Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Menuju  
Sikka Bahagia 2023

Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas  
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka  
Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas  
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Nomor  
13.a Tahun 2022 tentang perubahan Atas Keputusan  
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten  
Sikka Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja  
Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten  
Sikka Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam  
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN SIKKA

  
**YOSEF BENYAMIN, SH**  
Pemuda Utaman Muda  
NIP. 19690728 199901 1 006

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PESANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menyusuk Menyusuk Sektora Bahanga 2023								
	Memungkasnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Meningkatnya Aktifitas Perdagangan		Persentase Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%			
				Jumlah barang Masuk dan Keluar	Jumlah barang keluar masuk di kabupaten	Ton			
				Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan	Jumlah			
				Jumlah Kelompok Pedagang/ Usaha yang Dibina	Jumlah kelompok pedagang/usaha yang dibina	Jumlah			



NO	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAY	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAY KEHATAN	PEMANGGUNG JAWAB
							<b>Program Pelatihan Dan Penguatan Perencanaan</b>		Meningkatkan Survei Uraian	
							1. Penertiban Pergerakan Pasar Rakyat, Perbaikan, dan lain Usaha Toko Swalayan		Penjualan Pasar dapat dengan baik dan Mempunyai Legalisasi yang jelas	
							2. Penertiban Toko Dagang		Jumlah yang memiliki TIDG (tanda dagang)	
							3. Penertiban Waralaba Lintas Waralaba dalam Negeri		Jumlah Surat Tanda Waralaba	



NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	4. PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								5. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Pemasaran Waralaba Lajunan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Tanda Daftar Waralaba	
								6. Penerbitan Surat pin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengvoer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Unit Usaha yang memiliki STUP MB	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
							<p>7. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Diaribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tertaksananya Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Berbahaya</p>	
							<p>8. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</p>	<p>Jumlah SKA yang di Terbitkan</p>	
							<p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p>	<p>Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar</p>	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								1. Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Peningkatan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Jumlah pengelolaan Pasar Melakukan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja	
								<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
								Kegiatan :		
								1. Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terjaganya Stabilitas Pasar Kelutuhan Lainnya	
								3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Melakukan Pengawasan /terhadap penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	
								<b>Program Pengembangan Ekspor</b> Kegiatan :	Meningkatnya Jumlah Ekspor	
								1. Penyelenggaraan Promosi dan Miss Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Promosi dan Miss Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	
								<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	



NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PEMANGGUNG JAWAB
								Kegiatan :			
								1. Pelaksanaan Metrologi Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Legal	Terlaksananya Operasional Metrologi Perdagangan yang Sehat, sidang Tera, Pendataan UTTP, Pelayanan Tera, dan Pengawasan Tera	
								<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		Terlaksananya Identifikasi Produk Unggulan Daerah	
								Kegiatan :			
								1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Terlaksananya Kegiatan Promosi Unggulan dalam Negeri	
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Produktivitas Industri	Jumlah sektor	$\frac{\text{Umlh Industri yg berproduksi}}{\text{Umlh Industri}} \times 100$	%				

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kelompok Industri Rumah Tangga	$\frac{\text{Jmlh kel. industri RT yg dibina}}{\text{Jmlh Kel. industri RT}} \times 100$	%				
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya Industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2021	
							Kegiatan :			
							1. Penyusunan Evaluasi, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Daerah	
							Program Pengendalian Usaha Industri Kabupaten/Kota		Meningkatkan Legalitas IKM dan Mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri Tahun 202	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA NINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								Kegiatan :		
								1. Pemberian Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	IKM Kab.Sidoarjo yang Terfasilitasi IUI (Ijin Usaha Industri)	
								<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	Meningkatnya Sistem Informasi Industri Nasional	
								Kegiatan :		
								1. Penyediaan Informasi Industri untuk Industri Informasi untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	
	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat								
		Persentase UMKM Aktif								
			Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat dan Aktif	Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat dan aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$				

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Pelaku Usaha	Persentase Wira Usaha Terlatih	KINERJA	$\frac{\text{Jumlah wirausaha terlatih}}{\text{Total jumlah wirausaha}} \times 100$					
				Persentase Pelaku Usaha yang diberdayakan	KINERJA	$\frac{\text{Jumlah wirausaha terlatih}}{\text{Total wirausaha}} \times 100$					
								Program Pelayaan Lain Usaha Simpan Pinjam		Meningkatnya Pelayaan dan Usaha Simpan Pinjam	
								Kegiatan :			
								1. Peneruban Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Kerja/Kegiatan dalam Daerah Kabupaten, Kota		Sertabahaya Jumlah Koperasi yang Mempelajari SKSP	



NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
							<p>2. Penetapan Ijin Pembukaan Kantor Cabang-Cabang pembantu dan kantor Ijas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b></p> <p>Kegiatan :</p>	<p>Bertumbuhnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Ijas Koperasi Simpan Pinjam</p>	
							<p><b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b></p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Penilaian Kesehatan Nap/Up Koperasi</b></p>	<p>Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi</p> <p>Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi keanggotaan dalam Daerah</p> <p>Jumlah KSP/USP yang sehat</p>	

NO	VISI/MISSI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								<p>2. Penyerbikan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b></p> <p>Kegiatan :</p>	<p>Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</p>	
								<p><b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b></p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi</b></p>	<p>Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi</p> <p>Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi Koperasi keanggotaan dalam Daerah</p> <p>Jumlah KSP/USP yang sehat</p>	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SARASAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								Kegiatan :			
								1. Pemberdayaan dan Pembangunan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatkan Perolehan Kapernas dan UKM	
								<b>Program</b> <b>Pembudayaan</b> <b>Manangah,</b> <b>Kasell, Dan</b> <b>Mikro (UMKM)</b>	<b>Usaha</b> <b>Usaha</b> <b>Usaha</b>	Memangkasnya Usaha Manangah, Usaha Kasell dan Usaha Mikre	
								Kegiatan :			
								1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang di lakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Konsultasi Pelayanan, Perguruan Kolektif/organisasi dan Konsultasi dengan Para Pemangga Keperguruan		Terlaksananya Pencapaian Pembudayaan Usaha Mikro	
								<b>Program</b> <b>Pengembangan UMKM</b>		Meningkatkan Pengembangan UMKM	

NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								Kegiatan		
								1. Pengembangan Usaha Mikro dan Ortomas Pengembangan Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Usaha Mikro dan Pengembangan Usaha	
								<b>Program penunjang Dusun Pemerintah Daerah</b>	Penyusunan Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPNUK	
								Kegiatan :		
								1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPNUK	
								2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyusunan administrasi kepegawaian yang melibatkan kelancaran tugas dan fungsi DPNUK	



NO	VISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	DAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
								<b>Program Administrasi Umum Daerah</b>	<b>DAH Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PKUKM	
								Kegiatan :			
								Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen	Jumlah alat listrik yang disediakan	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemangjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Disediakan	
								Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PKUKM	

B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	VISI/MISI/TUJUAN AN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2019)	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	
							2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terperuhnya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sidika Bahuga 2023											
	Memplornya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB			%	27,48	13,78	16,59	19,4	22,21	22,21
			Memplornya Akutifitas Perdagangan	Jumlah Barang Masuk dan Keluar	Ton	813.850	895.235	984.758	1.083.234	1.191.558	1.191.558
				Jumlah Sarana Perdagangan	Unit	63	77	85	93	102	102
				Jumlah Pedagog/ Usaha yang Dibina	Orang	6.088	6.697	7.366	8.103	8.913	8.913
	Memplornya Kontribusi Sektor Industri/ Industri Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB			%	1,74	1,73	1,74	1,75	1,75	1,75

NO	MISI/MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2019)	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Jumlah Produktivitas sektor Industri	IKM	590	650	720	800	845	845
			Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Binaan Kelompok Industri Rumah Tangga	%	45,08	35,85	36,56	37,29	38,04	38,04
	Meningkatnya Daya Saing Sehat Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat			%	6,68	6,81	6,94	7,08	7,22	7,22
		Persentase Aktif	UMKM		%	151,5	161,7	142,4	172,05	154,19	154,19
			Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Sehat	Persentase Koperasi Sehat Jumlah Koperasi Aktif	%	41,08	43,02	45,06	47,20	49,44	225,8
			Meningkatnya Jumlah Pelembaga Usaha	Persentase Wira Usaha Pelembaga Usaha	%	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,45

NO	VIRUS/NEURITIS/ALAM	JENIS/LOKASI/STREK	SARANG	PENYAKIT/ANAK/ANAK	SISTEM	KURUS/BERAKSI	TAMBAH KANDUNGAN		KURUS/BERAKSI		
							2011	2012			
				Parasitosis, Infeksi, Usus, dan Peningkatan Aktivitas	N	1,42	1,28	1,43	1,38	1,37	1,33

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANJUNGPINANG  
KABUPATEN TANJUNGPINANG



**YUSUF BERTAMBAK, SPS**  
PRAMUKA UTAMA MUDA  
NIP. 19900128 1990013 1 0006